

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Fransisca, Saiful, Nila Aprila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to examine the effect of accountability and transparency on performance-based budgeting. In this study the sample used is the Regional Government Organization (OPD) of Bengkulu Province. Tests conducted on the data that was obtained from the questionnaire of 68 respondents. The technique used to test this research hypothesis is F-test and t-test with 5% significant level. This study found that accountability and transparency positively influence on performance-based budgeting. The results of this study provide an important contribution for the government to pay more attention at accountability and transparency in budgeting planning in order to achieve effective and efficient performance

Keywords: Accountability, Transparency, Performance-Based Budgeting

1. Pendahuluan

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan pendekatan sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara lokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. PBK dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu pemerintahan menjadi sorotan publik seiring dengan proses pembangunan. Pada tahun 2011-2014, Provinsi Bengkulu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintahan. Namun, pada tahun 2015-2016 Provinsi Bengkulu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran kinerja dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga dapat dikatakan kualitas keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 mengalami penurunan. Dalam Suara Pembaharuan (Senin, 7 Agustus 2017) pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto melalui Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan, Taufik Adun, di Bengkulu menyambatkan bahwa realisasi penyerapan anggaran APBD masih di bawah harapan, yakni sebesar 29,76 persen. Ini terjadi akibat penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah

(OPD) masih rendah, dimana ada 23 OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, penyerapan anggaran masih rendah.

Hal ini terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya terkait dengan anggaran berbasis kinerja. Kondisi ini belum didukungnya tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah oleh dokumen perencanaan tahunan. Misalnya antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Rencana Kerja (Renja) dimana sasaran yang ada di Renstra belum didukung oleh program dan kegiatan yang ada di Renja. Begitu juga halnya pada saat pelaksanaan anggaran masih ada satker yang berfikir bagaimana menghabiskan anggaran yang tersedia lebih menjadi tujuan daripada pencapaian target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen anggaran. Segala upaya dilakukan untuk menghabiskan dana yang tersedia dalam anggaran terutama pada akhir tahun anggaran, ini merupakan fenomena yang masih sering ditemukan hampir pada semua instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu.

Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan yang mengandung informasi relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Aliyah dan Nahar,2012).

Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan dan perbuatan kepada yang berkepentingan (Hunt, 2006). Lain hal dengan transparansi yakni mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka pada pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan (Haryatmoko, 2011). Pada akhirnya, unsur akuntabilitas dan transparansi menjadi suatu kebutuhan di dalam pengelolaan pemerintah termasuk bidang keuangan, khususnya dalam hal penyusunan anggaran berbasis kinerja. Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, terdapat banyak penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran di suatu instansi pemerintah. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah kerap terjadi dan muncul ke permukaan sehingga masyarakat seringkali mempertanyakan kinerja pemimpin daerah.

Adiwirya dan Sudana (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara simultan pada anggaran berbasis kinerja. Secara parsial, transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Lebih lanjut Hesrini (2015) menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Dalam proses penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia tidak lah mudah hal itu disebabkan oleh karena perubahan sistem penganggaran. Selain itu tantangan untuk merubah mindset lembaga eksekutif dan legislatif juga merupakan tantangan yang berat. Terutama mindset DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan APBD berubah menjadi output base tidak lagi input base.

Penelitian ini mencoba membuktikan pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dengan demikian pentingnya unsur akuntabilitas transparan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja pada setiap OPD, dikarenakan oleh tuntutan dan kandungan makna transparan itu sendiri, yang dapat menjadi

pendorong semangat kerjasama, membuka benteng birokrasi, terciptanya hubungan yang harmonis dalam lingkup organisasi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Pertanggungjawaban (Stewardship Theory)

Penelitian ini didasarkan pada stewardship theory. Stewardship theory muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, dimana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan principal. Teori Stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1989).

Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan steward, maka steward akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan principal dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam stewardship theory adalah manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan Principal namun tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007).

Berkaitan dengan sektor publik, teori stewardship lebih cocok digunakan ketimbang teori keagenan karena dalam teori stewardship, rakyat berperan sebagai principal sedangkan pemerintah berperan sebagai steward. Dalam teori ini pemerintah dianggap berkerja atas dasar pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat (Susanto dkk, 2015).

Rakyat menilai kinerja pemerintah melalui penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk melakukan hal ini perlu ada dukungan informasi yang disediakan oleh pemerintah sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui pengungkapan laporan keuangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2. Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan pendekatan sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara lokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. PBK dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas (tax payers).

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam suatu moneter standar an ukuran lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 2006). Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas mardiasmo (2002).

2.3. Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *accountability* berasal dari dua kata yaitu *account* artinya rekening, laporan, catatan dan *ability* yang artinya kemampuan. Dengan demikian *accountability* yang diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan, Suharto (2005).

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Sedarmayanti, 2004). Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas dalam pelayanan publik merupakan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lijan, 2006). Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas segala yang telah dilakukan pimpinan atau lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana pertanggung jawabannya tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

2.4. Transparansi

Menurut Andrianto (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipatif aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Dwiyanto (2006) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Menurut Hafiz (2000), transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Hardjosoemantri (2003) menyatakan bahwa seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Demikian juga oleh Krina (2003) yang mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan pengertian transparansi yang dikemukakan di atas dalam hal ini transparansi anggaran merupakan penyediaan informasi tentang anggaran pemerintahan yang harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

2.5. Akuntabilitas dan Penganggaran Berbasis Kinerja

Masyarakat sebagai principal mewajibkan pemerintah untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan informasi keuangannya terkait dengan segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai steward yang mengemban amanah. Pemerintah harus bisa memberikan pertanggungjawaban atas informasi yang disediakan dan berperan sebagai penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

Sulistoni (2003) menyatakan salah satu ciri akuntabilitas adalah mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Sopamah dan Mardiasmo (2003) pengelolaan keuangan SKPD yang transparan jika memenuhi terakomodasinya suara/usulan masyarakat.

Hal yang sama juga berlaku dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Masyarakat memiliki hak-hak untuk mengetahui, mengamati, mengemukakan pendapat dan mendapatkan informasi terkait dengan perencanaan penganggaran.

Masyarakat dan legislatif memiliki keterlibatan dalam jalannya pengelolaan keuangan OPD sebagai pihak yang melakukan pengawasan. Pengelolaan keuangan OPD yang baik adalah (1) penggunaan anggaran yang hemat, (2) sesuai dengan kebutuhan publik, (3) adil dan merata (4) dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai pelaporan perencanaan penganggaran keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus disajikan secara akuntabel kepada masyarakat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa penelitian mengenai akuntabilitas terhadap penganggaran berbasis kinerja yang telah dilakukan antara lain : Auditya, (2013), Wulandari (2014), Nandita, (2015) dan Ismiarti, (2012) dari hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas berpengaruh Positif terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja .

2.6. Transparansi dan Penganggaran Berbasis Kinerja

Teori stewardship menyebutkan bahwa antara steward dan principal terdapat perbedaan, dimana masyarakat merupakan principal yang memiliki hak sepenuhnya atas sejumlah sumber daya yang digunakan oleh pemerintah sedangkan pemerintah berfungsi sebagai steward yang mengemban amanah untuk memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan bersama.

Akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan, dimana kita ketahui bahwa output dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan yang merupakan dasar bagi pemerintah untuk menilai kinerja. Didalam pengelolaan keuangan tersebut harus disajikan secara akuntabel dan transparan, dimana transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa transparansi mengandung makna “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh

atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan” (Djalil, 2014:388).

Penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) yang berjudul “Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar” hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Secara parsial, transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini, menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang lebih condong pada transparansi dibandingkan dengan akuntabilitas.

Penelitian Hesrini (2015) dengan judul “Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Oleh sebab itu diterapkan kebijakan penganggaran dengan meningkatkan kualitas belanja melalui pemantapan penerapan system penganggaran yang tertuang dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Auditya (2013) Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja. Wulandari (2013) Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja. Berdasarkan hasil penelitian di atas menghasilkan hipotesis yaitu :

H2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak pemegang amanah (agent) kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut perwujudan dari keberhasilan atau kegagalan instansi (Mardiasmo, 2006).

Variabel ini menggunakan item pernyataan dan dinilai menggunakan skala likert 1-5, maksudnya nilai 1 (Sangat Tidak Setuju) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Sedangkan nilai 5 (Sangat Setuju) menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sangat tinggi.

3.1.2. Transparansi (X2)

Tranparansi anggaran merupakan pengukuran pencapaian target dalam penyediaan informasi tentang anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi anggaran tersebut, dengan indikator yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009), yaitu: a) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, b) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, c) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, d) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, dan e) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Variabel ini terdiri dari 8 pernyataan dengan

menggunakan skala likert dari sangat tidak setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan sangat setuju (5).

3.1.3. Penganggaran Berbasis Kinerja (Y)

Anggaran berbasis kinerja adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dalam Rencana Kerja dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat luas dengan indikator yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009), yaitu: a) Tahap persiapan; b) Tahap ratifikasi; c) Tahap implementasi; dan d) Tahap pelaporan dan evaluasi. Variabel ini terdiri dari 17 pernyataan dengan menggunakan skala likert dari sangat tidak setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan sangat setuju (5).

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran/PA (Kepala OPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di OPD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Dipilihnya responden diatas dikarenakan mereka terlibat langsung dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan memahami dalam mengatur kegiatan di masing-masing bagian keuangan.

3.3. Metode Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke alam bentuk yang lebih dapat diinterpretasikan. Data yang dihimpun dari hasil penelitian di lapangan akan penulis bandingkan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulannya. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Ada beberapa tehnik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- Uji Validitas, Seluruh item pernyataan setiap variabel penelitian, baik akuntabilitas, transparansi maupun penganggaran berbasis kinerja memiliki taraf signifikan di bawah 5%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pada setiap variabel penelitian adalah valid.
- Uji Reliabilitas. Nilai koefisien Alpha Cronbach instrumen penelitian akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen, maka dapat diindikasikan bahwa data hasil penelitian dari variabel akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja dapat digunakan sebagai data penelitian..

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap hipotesis dengan analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 30,961 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa model adalah fit atau layak

digunakan. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,472. Hal ini menunjukkan bahwa variasi peningkatan atau penurunan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas sebesar 47,2%. Sedangkan sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Table 1. Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian

Variabel	Koefisien	t-stat	Sig
(Constant)	6,745	0,791	0,432
Akuntabilitas(X1)	0,812	7,528	0,000
Transparansi (X2)	0,262	2,049	0,044
R ²	0,488		
Adjusted R ²	0,472		
F-stat	30,961		
Sig F	0,000		

4.2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu OPD, maka akan semakin akuntabel anggaran pada OPD tersebut sehingga akan meningkatkan efektivitas penerapan penganggaran berbasis kinerja pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Peningkatan akuntabilitas dipengaruhi langsung oleh aparatur yang bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan Muindro (2010) bahwa akuntabilitas ke bawah menunjukkan kemampuan pimpinan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakannya sehingga para pegawai ASN dapat memahami dan melaksanakan kebijakan yang diterapkan dengan baik.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa agar akuntabilitas dapat berjalan dengan efektif, OPD perlu meningkatkan pemahaman pegawai ASN atas deskripsi pekerjaannya serta program yang dilaksanakan. Hal inilah yang berperan dalam efisiensi penerapan penganggaran berbasis kinerja.

Pengungkapan laporan atas realisasi anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan menunjukkan penganggaran berbasis kinerja yang baik. Dengan demikian salah satu prinsip untuk mencapai penganggaran berbasis kinerja yang baik adalah dengan penerapan akuntabilitas atas output dari perencanaan penganggaran.

Untuk itu dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu juga harus memperhatikan apakah anggaran yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mencerminkan penganggaran berbasis kinerja yang telah berjalan dengan efisien.

Hasil penelitian ini mendukung *stewardship theory* dimana pertanggungjawaban terhadap output dari perencanaan penganggaran berupa pelaksanaan program dan kegiatan akan berdampak pada terciptanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Di saat yang bersamaan, OPD sebagai *steward* harus melakukan upaya dalam meningkatkan motivasi kerja para pegawai ASN serta mempertegas peraturan terkait dengan akuntabilitas yang akan membawa perencanaan penganggaran ke tingkat kinerja yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penganggaran berbasis kinerja pemerintah Kota Denpasar yang berarti bahwa semakin baik akuntabilitas suatu OPD maka akan sedikit terjadinya penyimpangan pada Pemerintahan Kota Denpasar.

4.3. Pengaruh Transparansi terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif transparansi terhadap penganggaran berbasis kinerja pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin transparan pengungkapan informasi keuangan OPD kepada publik akan mencerminkan seberapa efisien penerapan penganggaran berbasis kinerja pada OPD di Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka untuk meningkatkan penganggaran berbasis kinerja suatu OPD maka diperlukan transparansi dari anggota OPD tersebut dalam hal penganggarnya. Transparansi ini mendorong suatu OPD untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan adanya informasi anggaran dan realisasi anggaran terhadap ASN sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih komitmen dan akhirnya meningkatkan kinerja ASN. Oleh karena itu dengan melakukan pengungkapan informasi anggaran akan meningkatkan kinerja penganggaran di OPD tersebut.

Hasil ini juga mendukung *stewardship theory* dimana pemerintah merupakan pengemban amanah dalam memanfaatkan sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya informasi anggaran yang transparan tersebut diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan lebih meningkat lagi.

Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Aditya dkk (2013) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya adalah penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) dimana secara simultan maupun parsial transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap penganggaran berbasis kinerja di Pemerintahan Kota Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan penganggaran berbasis kinerja pada Pemerintahan Kota Denpasar.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintahan Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang dipaparkan sebagai berikut:

- Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penganggaran berbasis kinerja pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin akuntabel pertanggungjawaban pemerintah maka akan meningkatkan kualitas dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja pada OPD di Pemerintahan Provinsi Bengkulu.
- Transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap penganggaran berbasis kinerja pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi laporan keuangan yang diungkapkan maka akan meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja dalam OPD di Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

References

- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah dan Putu Sudana. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.2 2015: 611-628.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anthony, Robert N. Dan Govindarajan, Vijay. 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anton, F. X. (2010). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2)
- Anwar, Khoirul. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Auditya, Lucky, Husaini dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1 : 21- 42 (ISSN 2303- 0348)*.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit: Erlangga
- Battinggi, A dan Badu Ahmad. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- BPKP. 2008. *Pedoman penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3.
- Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1989. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Washington, DC.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Ellwood. 2003. *Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management, Local Government Studies*. VOL 19, pp 368-386.
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5 2015*.
- Georgopolous, Basil dan Arnold Tannenbaum. 2000. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. Ghozali 2006, 2013
- Hafiz, Abdul Tanjung. 2000. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta. Darwin
- _____. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Handyaningrat, Soewarno. 2004. *Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hansen, R. D. & Mowen, M. 2009. *Management Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. *Good Governance Dalam Pembangunan di Indonesia*. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hesrini, Elly. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik. *e -Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA*.
- Hunt, G. 2006. *The Principle of Complementarity: Freedom of Information, Public Accountability and Whistleblowing*. In *Open Government in a Theoretical and Practical Context*. Burlington : VT Ashgate.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *e-government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ivancevich, John, M, Robert Konopaske, Michael T. Matteson. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Krina, P. 2003. *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lembaga Administrasi Negara. 2004. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: Raga Meulaba.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Teknologi Informasi dalam Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lijan, Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Margono, S. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

- Mohamad, Ismail., Rasul, Sjahrudin., dan Umar, Haryono. 2004. Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Mulyadi. 2006. Akuntansi Manajemen – Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat
- Nandita, N R., 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik dan Penerapan SPIP terhadap Kinerja SKPD Provinsi Bengkulu. Publikasi Ilmiah, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Nasution, S. 2002. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta. Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. 2014. Implementasi E-government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Jurnal Ilmu Administrasi Volume XI Nomor 3 Desember 2014.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Jakarta 2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Permana, Imam Arif. 2015. Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan). Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Putra, Hendra G. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). Artikel Ilmiah: Universitas Negeri Padang.
- Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran. Jakarta: Detail Rekod
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Edisi. Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Yogyakarta.
- Sa'adah, Binti. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3, Nomor 2, Agustus 2015.
- Saptra, Devi Satria dan Darwanis. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemda Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3 Nomor 2.
- Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju.
- Shim, Jae K. Dan Joel G. Siegel. 2007. Budgeting. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, Sondang. 2012. Manajemen Sumber Daya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sonny. 2013. Analisis Penerapan E-government Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 7, Juli 2013 hlm 175-184
- Steers, Richard M. 2005. Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta
- Susanto, Azhar. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Ghaila Indonesia.
- Susanto, D., Yusuf, D. A., & Rachmawati, Y. 2015. Pengaruh Good Governance. Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. Paradigma, 12(02, 073-091
- Urip Santoso, 2017. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Aminnistrasi Bisnis Vol. 4 Nomor 1.
- Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokus Media.

Halaman ini sengaja dikosongkan